

**LEMBARAN DAFTAR
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor :1

TAHUN 2005

SERI : E Nomor 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2001 TENTANG RENCANA STRATEGIK
PEMBANGUNAN
DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2001-2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian visi misi pembangunan daerah sebagai penjabaran Polda dan Properda secara lebih konkrit maka perlu dilakukan analisis atas kebijakan program dalam berbagai bidang.
- b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Materi Dalam Negri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan dalam rangka kelanjutan penyelenggaraan pembangunan di Propinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 20001-2006;
- Mengingat : 1. Undang-undanhg Nomor 13 Tahun 1969 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1689);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2006);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9 Seri D Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

DAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
RENCANA STRATEGIK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2004-2006.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9 Seri D Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3
Sistematika Restra Tahun 2001-2006 sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan
BAB I : Analisis Situasi
BAB III : Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB IV : Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
BAB V : Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
BAB VI : Matriks Program dan Kegiatan Pembangunan 2001-2006
BAB VI : Penutup
2. Ketentuan Pasal 4
Materi RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 18 Januari 2005

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu

Pada tanggal 18 Januari 2005

**SEKERTARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd + cap

G U M Y A D I

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2005
SERI E NOMOR 1

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2005 SERI
E NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Daerah
Propinsi Sulawesi
Tengah
Nomor : 01 Tahun 2005
Tanggal : 18 Januari 2005

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan di laksanakan untuk memecahkan permasalahan di maksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib di susun dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

RESTRRA Provinsi Sulawesi Tengah memuat kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan, baik dalam lingkup kabupaten dan kota, lintas kabupaten dan kota, sektoral maupun lintas sektoral, sekaligus sebagai rencana taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan layanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

RENSTRA ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, PERDA Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006 dan PERDA Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagai penjabaran POLDAS dan PROPERDA secara lebih konkrit maka perlu di lakukan pemilihan atas kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam kerangka inilah di susun Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006.

Memasuki Tahun ketiga mas jabatan Gubernur Sulawesi Tengah wacana mengenai Penyempurnaan Rencana Strategis (RESTRRA) Daerah muncul ke permukaan menjadi topik bahasan yang sangat menarik, Banyak terjadi perubahan yang pada

mulanya tidak terjangkau dalam penyiapan Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006. Oleh karena itu, sudah waktunya dilakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dalam bentuk Penyempurnaan-penyempurnaan terhadap berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA tersebut.

Penyempurnaan ini dimaksud didasari oleh beberapa alasan, antara lain:

1. Kenyataan yang ada memberi pelajaran kepada kita bahwa dalam perjalanan waktu tiga tahun terakhir, terdapat banyak dinamika dan perubahan yang terjadi dan perlu di sahuti ., khususnya yang telah menjadi program pengentasan kemiskinan dan program yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum(pemilu) Tahun 2004;
2. Beberapa program dan kegiatan yang sampai menjelang tahun ketiga masa jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, belum diimplementasikan dengan “tajam” oleh dinas/badan/satuan kerja di lingkungan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, antara lain : Penguatan Kelembagaan Pemuda, Evaluasi Peraturan Daerah (PERDA) yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi mutakhir, Pemberdayaan Hukum Adat, Pemberdayaan kelembagaan dan aparat pemerintahan kabupaten baru;
3. Adanya program dan kegiatan yang karena kekurangan atau ketiadaan dana untuk melaksanakannya sehingga perlu dipikirkan untuk ditinjau kembali keberadaannya dalam RENSTRA tersebut;
4. Adanya program dan kegiatan yang seharusnya dan telah dibiayai melalui Anggaran Dekonsentrasi sehingga tidak perlu menjadi beban APBD;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dengan nomenklatur yang berbeda dari nomenklatur Pembidangan yang digunakan dalam RENSTRA.

Penyempurnaan dimaksud bukan pada substansi RENSTRA (Visi, Misi, Strategi) melainkan pada program dan kegiatan yang diperlukan.

Penyempurnaan RENSTRA ini sangat penting mengingat program dan kegiatan dalam RENSTRA menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD dan pembahasan legislatif atas RAPBD. Berdasarkan lembaran isian yang disampaikan kepada dinas/badan/satu kerja dalam lingkup Pemerintahan Negara Propinsi Sulawesi Tengah tentang program maupun kegiatan serta target yang ditetapkan dalam RENSTRA diperoleh masukan mengenai pentingnya penyempurnaan Rencana Strategis Daerah dalam kerangka kesuksesan penyelenggaraan Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyempurnaan RENSTRA ini dimaksud sebagai upaya untuk menyahuti berbagai program dan kegiatan yang tidak terdapat dalam RENSTRA namun merupakan program dan kegiatan yang penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan misi daerah.

Tujuannya adalah mengarahkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga bisa lebih sesuai dalam upaya melaksanakan Misi Daerah Sulawesi Tengah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Pengertian

Rencana Strategis adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah yang disahkan oleh DPRD dan kepala daerah.

RENSTRA akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD, Strategi dan Prioritas APBD, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai kebutuhan daerah dengan mengacu pada POLDAS dan PROPEDA.

Dalam pengertian tersebut diatas, maka penyempurnaan Rencana Strategis akan digunakan sebagai rujukan untuk penyusunan AKU APBD, Strategi dan Prioritas APBD dan RAPBD Tahun 2005 serta menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup RENSTRA Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006 mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari aspek birokrasi pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, budaya, agama, keamanan dan ketertiban serta penataan ruang.

D. Kedudukan dan fungsi

Rencana Strategis Daerah berkedudukan dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang di tuangkan ke dalam rencana program dan kegiatan lima tahun daerah;
- 2) Menguraikan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD dan dalam skala prioritas dengan memberikan penekanan pada program dan kegiatan yang berimplikasi pada rencana pendapatan dan belanja daerah;
- 3) Merupakan alat Bantu yang terukur bagi rujukan kinerja Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, dengan menggunakan 5 indikator, yaitu : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

E. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan perubahan RENSTRA Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

- 1) Menjamin adanya konsisten perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 2) Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang telah di bahas secara partisipatif antar seluruh pelaku pembangunan daerah, mulai dari saat menyusun POLDAS, penguatan ke dalam. PROPEDA dan RENSTRA sampai dengan penjabarannya ke dalam Repetada dan RAPBD.

F. Landasan Penyusunan

RENSTRA Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di susun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- 1) Landasan Idiil : Pancasila
- 2) Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945 beserta Perubahannya
- 3) Landasan Operasional : Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2001-2006 dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah 2001-1006.

G. Sistematika Penyusunan

- BAB I : Pendahuluan, yang berisi : Umum, Pengertian, Ruang Lingkup, Kedudukan dan Fungsi, Maksud dan Tujuan, Landasan Penyusunan dan Sistematika Penyusunan
- BAB II : Analisa Situasi, menggambarkan Kondisi Umum, Kondisi Internal dan Kondisi Eksternal, serta Proyeksi Pertumbuhan dan PDRB serta Permasalahan Pembangunan
- BAB III : Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan Umum dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB IV : Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
- BAB V : Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, yang Memuat Kerangka Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Pancasila Akutabilitas Kinerja.
- BAB VI : Matriks Program dan Kegiatan Pembangunan 2001-2006 Provinsi Sulawesi Tengah
- BAB VII: Penutup

BAB I

ANALISIS SITUASI

A. Kondisi Umum

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, memiliki luas wilayah daratan 68,033 km² atau 35,96 persen dari pulau Sulawesi dan perairan laut seluas 193.923,75 km². Posisi geografis terletak antara batas koordinat 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan serta 119°22' dan 124°22' Bujur Timur. Batas administrasi meliputi: Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Utara Serta Provinsi Gorontalo, Sebelah Timur dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara; sebelah Selatan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Sebelah Barat dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Administrasi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 secara berjenjang terdiri atas 7 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota, 70 wilayah kecamatan, 123 wilayah kelurahan dan 1.280 wilayah desa (termasuk 2 desa persiapan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas 8 Wilayah Kabupaten dan 1 Wilayah kota. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 9 kabupaten dan 1 kota yang meliputi 90 Kecamatan, 132 Kelurahan dan 1.341 desa (termasuk 41 **UPT**).

Jumlah Penduduk dalam kurun waktu 1995-2000 mengalami peningkatan dari 1.896.724 jiwa menjadi 2.079.201 jiwa, Kepadatan penduduk rata-rata mencapai 30 jiwa per kilometer persegi. Konsentrasi penduduk tertinggi berada di Wilayah Kota Palu dengan kepadatan mencapai 697 jiwa per kilometer persegi dan terendah di Kabupaten Morowali yaitu 10 jiwa per kilometer persegi, Sedang tahun 2003 jumlah penduduk bertambah menjadi 2.242.914 jiwa, kepadatan penduduk rata-rata mencapai 32 jiwa per kilometer persegi. Konsentrasi penduduk tertinggi berada di wilayah kota Palu dengan kepadatan mencapai 713 jiwa per kilometer persegi dan terendah di kabupaten Morowali yaitu 11 jiwa per kilometer persegi.

Interaksi antara wilayah provinsi Sulawesi Tengah dengan provinsi lainnya di Sulawesi serta daerah lainnya di Indonesia, dimungkinkan dengan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan darat trans-Sulawesi, prasarana dan sarana perhubungan laut serta udara yang semakin memadai. Lancarnya komunikasi lokal, interlokal maupun internasional ditunjang dengan tersedianya jaringan telekomunikasi serta fasilitas internet, meskipun masih berkonsentrasi pada ibu kota provinsi dan kabupaten/kota.

Khususnya mengenai prasarana perhubungan darat, panjang jalan pada tahun 2000 tercatat 10.814,27 km, kondisi jalan ini jalan tersebut khususnya jalan negara dan provinsi yang terkategori baik adalah sepanjang 499,44 km (jalan negara 319,39 km dan jalan provinsi 180,05 km), berkategori sedang sepanjang 1.838,57 km (jalan negara 729,72 km dan jalan provinsi 1.108,85 km), berkategori rusak ringan sepanjang 711,97 km, (jalan negara

476,31 km dan jalan propinsi 235,66 km), dan berkategori rusak berat sepanjang 580,08 km (jalan negara 67,58 km dan jalan propinsi 512,50 km).

Jaringan irigasi yang terbangun telah mampu berfungsi mengairi lahan sawa seluas 79.606 ha atau sebesar 63,34 persen dari total luas areal persawahan tahun 1999,. Dan tahun 2003 telah mampu mengairi 87.272 ha atau 65,06 Persen.

Berdasarkan perkembangan distribusi PDRB atas dasar harga konstan 1993, menunjukkan 3 sektor ekonomi yang mempunyai peran terbesar dalam PDRB Tahun 2000. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominant dalam pembentukan PDRB dengan kontribusi 47,68 persen, diikuti oleh sektor jasa-jasa 12,73 persen serta sektor perdagangan, hotel dan restoran 12,02 persen. Sektor lainnya yang cukup dominant adalah sektor angkutan dan komunikasi sebesar 7,44 persen, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; listrik dan air bersih serta keuangan dan jasa perusahaan masing-masing memberikan kontribusi kurang dari 7,00 persen.

Sementara tahun 2003 kontribusi sektor pertanian naik menjadi 49,13 persen, sektor jasa-jasa tidak mengalami pergeseran, hanya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran menurun menjadi 11,53 persen, sektor angkutan dan komunikasi menurun menjadi 6,94 persen, sedangkan sektor pertambangan dan pengalihan; listrik dan air bersih serta keuangan dan jasa perusahaan menurun sebesar 4,00 persen.

Kesejahteraan sosial masyarakat yang diukur berdasarkan derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat di lihat dari indikator utama, yaitu angka kematian dan angka harapan hidup, di samping angka kesakitan. Angka Kematian Bayi Tahun 1999 sebanyak 61 per 1000 kelahiran, dan menurun menjadi 52 per 1000 kelahiran pada Tahun 2002-2003. Angka Harapan Hidup pada Tahun 1999 tercatat 63 Tahun, naik menjadi 63,3 tahun pada tahun 2002. sementara presentase penduduk yang menderita keluhan sakit mencapai 29,2 persen pada Tahun 1999 menurun kembali menjadi 27,15 persen pada Tahun 2003. keseluruhan indikator di atas menunjukkan bahwa pada masa krisis terjadi penurunan derajat kesehatan penduduk dan mulai berangsur membaik pada masa pemulihan.

Tingkat Pendidikan masyarakat menunjukkan kondisi yang lebih baik, penduduk yang tidak dapat menulis dan membaca 5,03 persen pada Tahun 1999 naik menjadi 7,73 persen pada Tahun 2001, pada tahun 2003 menurun 6,37 persen. Angka Partisipasi Murni (**APM**) pada jenjang Sekolah Dasar meningkat dari 93,94 Tahun 2001 menjadi 96,60 Tahun 2003, Tingkat **SLTP** meningkat dari 69,56 menjadi 72,82.

Indikator Kesehatan Rakyat menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Rumah Tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai di atas 50 meter persegi pada Tahun 2000 sejumlah 49,88 persen, menurun menjadi 44,05 persen pada tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 46,42 persen pada Tahun 2003. rumah yang berdinding tembok meningkat dari 41,70 persen pada tahun 2000 menjadi 42,36 persen pada tahun 2003; Rumah tangga yang mendiami rumah berlantai tanah di Tahun 1996 sebanyak 18,2 persen menurun menjadi 15,02 persen pada tahun 2003. penggunaan atap

dedaunan pada bangunan rumah penduduk menunjukkan penurunan, yaitu dari 31,1 persen pada tahun 2003. konsumsi Air bersih dan sumur terlindung. Tahun 2000 pengguna sarana tersebut baru mencapai 70,20 persen, namun pada tahun 2003 telah mencapai 87,17 persen rumah tangga.

Keamanan dan ketertiban umum mengalami di stori yang terindikasi oleh adanya pengungsian penduduk dari daerah asalnya yang di sebabkan oleh kerusakan di kabupaten Poso serta musibah bencana alam. Peristiwa yang sangat memilukan ini secara simultan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, utamanya pada lokasi terjadi peristiwa tersebut. Berbagai fasilitas layanan publik (masyarakat) yang vital mengalami kerusakan, pemukiman penduduk musnah dan banyaknya mengungsi akibat musibah tersebut.

B. Kondisi Internal dan Eksternal

Berbagai perubahan dan kecenderungan lingkungan strategis, baik dalam skala global, regional, nasional maupun lokal, bagaimanapun bentuknya akan berpengaruh baik langsung maupun tidak terhadap kelangsungan dan proses pembangunan daerah.

Dalam lingkup global, dinamakan lingkungan strategis yang di picu oleh kecenderungan perdagangan global, pesatnya kemajuan teknologi, tuntunan dan kesadaran masyarakat akan demokrasi dan HAM. Dinamika tersebut selain mengharuskan kesiapan yang memadai, baik berupa kelembagaan dan regulasi maupun sarana dan prasarana lainnya (transportasi, peran perkantoran, dan komunikasi), juga kesiapan sumber daya manusia yang mampu berkopetensi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu berperan sebagai fasilitator yang baik dalam mengatur dan mendorong agar pembangunan Daerah dapat tumbuh secara signifikan. Di samping itu, juga di butuhkan upaya antisipasi dalam pengelolaan perubahan dan dampak negatif yang di timbulkan serta memperkuat tata nilai budaya dan kearifan lokal sebagai perisai.

Dalam lingkup regional, dinamika lingkungan, strategis mengarah pada kesepakatan pada hubungan kerja sama kawasan antar regional negara yang berbatasan dengan wilayah yurisdiksi Negara Indonesia, khususnya yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinamika tersebut di nilai sangat strategis menjadi pasar barang dan jasa serta produk unggulan lainnya dari masing-masing negara yang memberi nilai tambah bagi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Regionalisasi tersebut dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa unyuk mengoptimalkan potensi bersama menghadapi globalisasi, perlu upaya mengelompokkan negara-negara dalam suatu kawasan, lebih-lebih dalam menghadapi sumber daya yang semakin langka, ikatan kerja sama antara negara maju dan negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan eksploitasi sumber daya alam yang saling menguntungkan semakin di perlukan. Kondisi demikian perlu di cermati guna mencegah terjadinya intervensi pihak luar yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam lingkup nasional, dinamika lingkungan strategis dapat berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah melalui perubahan yang di nilai strategis, yaitu:

- a. Implementasi otonomi daerah dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan hak otonomi yang di milikinya. Menjadi peluang bila mana daerah mampu mengelola dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya seluruh potensi yang ada. Sebaliknya menjadi tantangan jika sumberdaya yang tersedia tidak mampu di manfaatkan dengan sebaik-baiknya, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Perubahan sistem dalam kehidupan politik dan tumbuh suburnya berbagai jenis kelembagaan politik dan kemasyarakatan dewasa ini pada prinsipnya sangat di harapkan menjadi media yang efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta menjadi sarana bagi penciptaan nuansa kehidupan yang demokratis. Akan tetapi kecenderungan yang muncul, kelembagaan-kelembagaan yang justru belum mampu melaksanakan fungsinya fungsinya sebagai mana yang di harapkan, dan bahkan cenderung menjadi media ajang konflik bagi kelompok atau golongan tertentu. Fenomena ini perlu di waspadai melalui beberapa kebijakan, sehingga kelembagaan politik dan masyarakat yang ada mampu melaksanakan fungsinya dalam kehidupan politik yang dekratis, dan bukan sebaliknya menjadi media penciptaan kehidupan politik yang anarkis.
- c. Pembangunan yang berlangsung selama ini ternyata belum mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang berkeadilan, karena pembangunan ekonomi hanya bertumpu pada upaya pertumbuhan yang setinggi-tingginya dan mengabaikan aspek pemerataan. Pendekatan ini telah menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, ketertinggalan dan kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Masalah kesenjangan dapat memicu potensi konflik sosial di masyarakat, sehingga perlu di waspadai dan diantisipasi melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pemberdayaan Ekonomi rakyat;
- d. Heteroganitas masyarakat di berbagai daerah di indonesia disamping sebagai kekuatan pembangunan juga sangat rentan pemicu terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA bila tidak di cermati dan di kelola dengan cepat. Kerusuhan sambas, Ambon, Sampit, dan Poso merupakan contoh faktual yang menjadi catatan hitam dalam kehidupan nasional yang selama ini di rajut oleh toleransi, kebersamaan, keakraban dan kesetiakawanan sosial, ternyata terganggu oleh kecemburuan sosial dari kelompok/komunitas masyarakat tertentu terhadap komunitas masyarakat lainnya.
- e. Penegakan supremasi hukum dan keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai lambat dalam penerapannya dan cenderung belum profesional dan amanah (*Good Governance*), bebas dari praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

pelayanan masyarakat, adalah masalah-masalah yang sangat berpengaruh dan mendesak untuk di tata kembali, sehingga tatanan masyarakat madani menjadi prasyarat mewujudkan Madani tidak sekedar impian;

- f. Tuntutan Reformasi yang menginginkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan tatanan kehidupan bermasyarakat ternyata belum di dukung oleh kesiapan daerah dalam mempersiapkan berbagai piranti kelembagaan dan peraturan daerah serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat menyebabkan terjadinya eforia reformasi yang berdampak pada tindakan kekerasan dan anarkis;
- g. Pemilikan beberapa sumberdaya alam dan komoditas perdagangan yang tersedia namun sudah sangat terbatas di negara lain, memiliki nilai komparatif yang perlu di kelola secara arif dan bijaksana agar memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat secara tepat waktu dan optimal serta berkelanjutan.

Dalam skala lokal, dinamika lingkungan strategis sebenarnya sudah terakomodir dalam dinamika lingkungan strategis pada lingkup nasional seperti digambarkan di atas, namun demikian secara spesifik Propinsi Sulawesi Tengah tentunya memiliki variasi lokal yang lebih khusus dan berbeda dengan daerah lainnya pada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah dimasa mendatang. Aspek dimaksud, meliputi :

- a. Kemauan rakyat Sulawesi Tengah untuk melakukan reformasi total melalui proses transformasi yang mengeliminir gejala dan potensi konflik, hal ini dinilai strategis karena masih kuatnya sifat peternalistik. Di pihak lain, mengindikasikan masih ada pejabat yang enggan bersahabat dengan tuntutan reformasi, sehingga praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dan penyimpangan yang terselubung masih mengganggu dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan
- b. Dampak kerusakan poso yang dapat menimbulkan dendam yang mendalam dari kelompok masyarakat yang menjadi korbannya, membutuhkan upaya yang serius untuk merajut kehidupan kembali yang aman, tentram, akrab dan bersahabat di daerah melalui peran bersama seluruh komponen masyarakat, dengan jiwa besar dan kesadaran yang tinggi, mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi pembangunan daerah ini, bangsa dan negara dengan tidak mengabaikan nilai-nilai sosial dan budaya etnis lokal;
- c. Posisi geografis Sulawesi Tengah yang terbuka dan dapat diakses dari berbagai alur laut dan darat, merupakan faktor yang dapat menguntungkan di samping merugikan dari segi intervensi kekuatan luar khususnya segi pertahanan keamanan yang harus diwaspadai. Dalam konteks pulau sulawesi, posisi ruang sulawesi Tengah bisa mendapat penguatan yang menguntungkan di samping kecenderungan eksploitasi yang merugikan dari ruang posisi sulawesi Selatan ,Sulawesi Utara ,Sulawesi Tenggara Gorontalo dan sulawesi Barat dalam mengakses kawasan strategis lainnya Di pulau jawa dan kawasan Timur indonesia lainnya ataupun dalam konteks Asia pasifik yang terus berkembang saat ini ,

- d. Otomi daerah dilaksanakan pada saat negara dalam kondisi krisis multidimensional, sehingga Implementasinya belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal .

Untuk merumuskan rencana strategis pembangunan daerah provinsi Sulawesi Tengah ,adalah tidak cukup jika hanya didasarkan pada dinamika lingkungan strategis sebagaimana diuraikan diatas ,melainkan masih harus dilakukan serangkaian upaya eksplorasi, identifikasi ,dan inventarisasi terhadap berbagai aspek pembangunan dan perkembangan aspirasi masyarakat .untuk maksud tersebut .maka pendekatan yang ditempuh adalah dengan menggunakan analisis SWOT .fokus kajian dengan pendekatan analisis ini diitikberatkan pada kondisi lingkungan internal yang mencakup faktor kekuatan dan kelemahan ,dan kondisi lingkungan eksternal yang mencakup faktor peluang dan tantangan secara ringkas ,substansi dari hasil analisis SWOT tersebut di rumuskan sebagai berikut :

1. Kondisi Lingkungan Internal

Kekuatan :

- a. Secara geografis Sulawesi Tengah memiliki posisi penting dalam pengembangan jaringan interkoneksi pembangunan kewilayahan di Kawasan Sulawesi, baik dalam lingkup pembangunan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;
- b. Karakter masyarakat Sulawesi Tengah yang terbuka, memiliki nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan serta modal sosial yang tinggi, merupakan modal dasar pembangunan, khususnya dalam hal mengembangkan kemitraan dalam berbagai bidang pembangunan;
- c. Sulawesi Tengah memiliki potensi SDA yang cukup prospektif dikembangkan untuk usaha-usaha ekonomi produktif, terutama sumberdaya lahan untuk pertanian dan perkebunan, pertambangan, industri, energi, perikanan dan pariwisata;
- d. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan serta semangat keagamaan yang dibarengi oleh kemauan politik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah melakukan reformasi kelembagaan sebagai upaya pemantapan implementasi otonomi daerah, merupakan pondasi yang kuat dalam rangka mempertahankan kelangsungan pembangunan.

Kelemahan :

- a. Topografi wilayah Sulawesi Tengah yang sebagian besar terdiri atas kawasan perbukitan dan pegunungan serat kawasan pesisir, menyebabkan aksesibilitas antar kawasan tersebut sangat sulit. Kondisi ini merupakan kelemahan yang perlu di tangani dalam rangka pengembangan interkoneksi antara kawasan tersebut sangat sulit. Kondisi ini merupakan kelemahan yang perlu di tangani dalam

rangka pengembangan interkoneksi antar kawasan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah ;

- b. Kecenderungan makin menurunnya solidaritas sosial dan Merebaknya potensi konflik ,meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi ,menguatnya diskriminasi hukum dan keadilan serta masih relatif rendahnya kemandirian infrastruktur politik daerah ,merupakan titik-titik lemah yang perlu di atasi dalam upaya mempertahankan keberlanjutan pembangunan di Propinsi sulawesi tengah.
- c. Keterbatasan penyediaan energi, belum memedainya pemberian insentif bagi perluasan usaha ekonomi dan penguatan dunia usaha, belum memadainya sarana dan prasarana ekonomi, masih rendahnya upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta belum terciptanya suasana yang kondusif bagi perwujudan rasa aman dan tentram dikalangan masyarakat, merupakan permasalahan yang dihadapi dalam rangka upaya optimalisasi pembangunan;
- d. Mutu SDM yang relatif masih rendah, belum diwujudkannya paradigma baru dalam penyelenggaraan pembangunan dari peran pemerintah sebagai pelaku pembangunan ke peran sebagai fasilitator pembanguna dan masih lemahnya upaya penegakan hukum, merupakan titik lemah yang mengakibatkan belum optimalnya layanan publik.

2. Kondisi lingkungan eksternal

Peluang ;